BAB II

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka umumnya berisi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas masalah yang sedang dikaji dari sisi teori yang ada. Teori sangat penting peranannya dalam menjembatani kegiatan penelitian. Landasan teori ini berfungsi untuk memahami masalah secara baik, membantu mendeskripsikan masalah secara lebih mendalam, mengetahui keterkaitan antar masalah yang dikaji dengan masalah lain yang mempunyai hubungan (Umi Narimawati, 2010:24).

2.1.1 Good governance

2.1.1.1 Pengertian Good governance

Good governance dikemukakan oleh Soelendro (2000) dalam Ihyaul Ulum (2004) adalah sebagai berikut:

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (mengendalikan), *direct* (mengarahkan), *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Pengertian *good governance* diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Good governance* sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahannya yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar dilingkungan kita selama ini,

antara lain yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Good governance adalah, suatu penyelenggaraan negara yang mengarah pada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah – masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi.

Menurut **Mardiasmo (1998)** pengertian *Good Governance* adalah :

"suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor public oleh pemerintahan yang baik."

Sedangkan, menurut Bank Dunia **(2003)** yang dikutip oleh **Wahab** menyebut *good governance* adalah :

> "suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya akitvitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor dan masyarakat."

Menurut **UNDP** pengertian good governance adalah sebagai berikut:

Governance diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dengan cara bagaimana keputusan tersebut diterapkan (atau tidak diterapkan)

Menurut **Ibnu Rubiyanto (2001)** dari segi aspek dan fungsi good governance adalah sebagai berikut:

Governance dpat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efekktif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan,atau sebaliknya.

Menurut **Bank dunia (1992)** pengertian good governance adalah sebagai berikut:

"Good governance adalah pelayanan publik yang efisien,sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik".dengan demikian pengertian good governance mencangkup aspek kehidupan yang luas muali dari aspek hukum,politik,ekonomi dan sosial serta terkait erat dengan yugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif".

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang terbebas dari kolusi korupsi dan nepotisme mewujudkan negara ke arah perekonomian yang lebih baik.

2.1.1.2 Karakteristik good governance

Menurut **Mardiamo (2002)** karakteristik good governace adalah sebagai berikut :, mengemukakan bahwa karakteristik atau prisip – prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut :

"1. Partisipasi
2. Aturan hukum (*Rule law*)
3. Transparansi
4. Daya tanggap
5. Berorientasi konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi strategi

Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan di jelaskan berikut ini :

1. Partisipasi (*Participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

2. Penegakan Hukum (*Rule of law*), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Mewujudkan adanya law enforcement yang adil tanpa kecuali yangmenunjang HAM dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Transparansi (*Transparancy*), tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh-oleh mereka yang membutuhkan. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*), lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa pengecualian.

5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6. Kesetaraan (*Equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota masyar akat untuk meningkatkan kesejahteraan.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*), pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

8. Akuntabilitas (*Accountabil*ity), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

9.Visi Strategi (*Strategic vision*), penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Bertujuan untuk membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value of money (economy, efficiency, dan effectiveness).

2.1.2 Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

Sebagai implementasi dari **SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003** tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

Dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mengukur akuuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.1.2.2 Dasar hukum pemberlakuan LAKIP

Pemberlakuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diawali dengan **Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998** tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme .

Selanjutnya TAP MPR tersebut di tindaklanjuti dengan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep *good governance* tidak mungkin dapat diwujudkan jika didalam suatu pemerintahan terdapat unsur-unsur KKN. Oleh karena itu, banyak para ahli yang sepakat berpendapat bahwa untuk membangun *good governance* harus ada *clean governance*. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa perwujudan *good governance* antara lain harus mengedepankan akuntabilitas publik dan

transparansi. Jika menghendaki suatu administrasi Negara yang demokratis, bersih dan bertanggungjawab dengan birokrasi yang professional.

2.1.2.3 Pengertian AKIP

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian AKIP yang menurut **SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003** tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah adalah

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian AKIP yaitu perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.2.4 Prinsip-prinsip AKIP

Menurut **SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003** tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;

b. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitas;

f. Harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari persyaratan-persyaratan diatas dapat di simpulkan bahwa pimpinan dan seluruh staf instansi dapat melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, misi, visi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.5 Pelaksanaan AKIP

Berdasarkan **SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003** tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, AKIP memiliki persyaratan pelaksanaan. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stat instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat didefenisikan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adalah komitmen untuk pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil manfaat yang diperoleh secara jujur, objektif, transparan dan akurat.

2.1.3 Kualitas pelaporan keuangan

2.1.3.1 Pengertian kualitas pelaporan keuangan

Pengertian Kualitas pelaporan keuangan menurut **Abdul Hafiz Tanjung (2008),** adalah sebagai berikut:

Kualitas pelaporan keuangan adalah Ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memnuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memnuhi kualitas yang dikehendaki sebagai berikut

“1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Penjelasan mengenai Karakteristik prasyarat normatif akan di jelaskan berikut ini :

a.Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

(a) Memiliki manfaat umpan batik *(feedback value)*

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga Pengambilan keputusan.

(d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi Pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b.Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi *(verifiability)*

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netratitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c.Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d.Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan menurut **Abdul Hafiz Tanjung (2008)** adalah sebagai berikut:

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakadalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yangdilakukan selama periode pelaporan.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Menurut **Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 24 tahun 2005 Tentang SAP atau Standar Akuntansi pemerintahan** dasar hukum pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

(b) Undang-undang di bidang keuangan negara;

(c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

(e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

(f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan

(g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.3.4 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Menurut **Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 24 tahun 2005 Tentang SAP atau Standar Akuntansi pemerintahan** kendala informasi yang relevan dan andal adalah sebagai berikut:

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan *(limitations)* atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

(a) Materialitas;

(b) Pertimbangan biaya dan manfaat;

(c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

Walaupun idealnya memuat segata informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya

penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

2.1.4Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Elvira Zeyn Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.1 No. 1, April 2011	Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintaha n terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi	Penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung sebesar 92.4% yang artinya komitmen organisasi yang merupakan variabel kontinjensi sangat mempengaruhiakuntabilitas keuangan yang mana pemahaman dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintahyang bersih dan berwibawa	good governance sebagai X1.	Penulis tidak menggunaka variabel standar akuntansi pemerintahan (X2)akuntabil itas keuangan Y.
2	Arifin	Pengaruh penerapan	Dari hasil penelitian dan analisapembahasan	Penulis memakai	Berbeda tempat

	2008 Jurnal ichsan gorontalo Volume 3 No.1 (ISSN 1907-5324)	laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap kewajaran laporan keuangan pada kantor camat tapa bone bolango	Yang dilakukan,maka peneliti dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa penerapan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdidri dari prencanaan strategi,pengukuran kinerja,pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kewajaran pelaporan keuangan	laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai x1 dan kewajaran laporan keuangan Y.	penelitian
3	Ponny Harsanti, Dwi Sudaryati dan Nora Hilmia 2008. (ISSN 1975 – 869)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS	Sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Penulis memakai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai Y.	Penulis melakukan penelitian di tempat yang berbeda
4	H.E Ristiandi. Vol.5 No.4,Mei 2004Pp 169-186	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai upaya peningkatan pengendalian internal dalam mewujudkan good governance	Pentingnya kebutuhan LAKIP sebagai upaya dan merupakan salah satu bentuk pengendalian internal dalam rangka mewujudkan good governance	Laporan akuntabilitas kinerja instasni pemerintah sebagai X1 dan Good governance Y	Penulis tidak menggunakan Variabel Penegendalian internal sebagai X2.
5	Richard Mulgan April 2002 ISBN 0 7315 3434	Accountability Issues in the New Model of Governance	By contrast with the public sector, accountability in the commercial private sector is both more and less extensive. It is more extensive in that	Akuntabilitas dan Good governance	Berbeda tempat penelitian

	4 ISSN 10302190		commercial companies have a comparatively clear 'bottom line' which makes them more readily accountable for final outcomes compared with public sector agencies whose objectives are often imprecise and contested. Companies whose shares are publicly traded are subject to a daily judgment on how well they are doing. Managers and directors are thereby highly accountable to their shareholders for their performance in way that few ministers or public officials are.		
6	Stella ladi 2008 ISSN 1790-8396 ISBN 978-960-6885-00-6	Good governance and public administration reform in the black sea economic cooperation	Good governance is firstly and above all the responsible use of power. The concept of good governance has been measured, studied and defined by numerous agents, international organisations and academics around the world, who have developed an array of theories as well as multiple and diverse standards for outlining what constitutes good governance. Yet, no one-size-fits-all formula was ever plausible. Indeed, the idea of an "administrative culture" is often evoked, only further emphasising how difficult it is to achieve reform in this particular field.	Good governance sebagai variabel dependen	Penulis tidak memakai variabel public administration
7	J.I. Gow ISSN 0834-1516 2001	ACCOUNTABILITY, RATIONALITY, AND NEW	Governance, and agency, means the need to have reporting or feedback systems. The move to performance measurement	Akuntabilitas sebagai variabel independen dan good	Berbeda tempat penelitian

	Canadian Evaluation Society	STRUCTURES OF GOVERNANCE: MAKING ROOM FOR POLITICAL RATIONALITY	has many things to recommend it. Even so, it seems quite unrealistic to believe that this approach can deliver rational, efficient, and effective government where so many approaches have failed. If it is like the others, something will remain of it, and a kind of learning will occur. If it allows for greater participation of employees and citizens in decisions that concern them, so much the better. Insofar as it does work, our political classes will have to learn some new virtues, and practice restraint and self-denying discipline to make it work as a model of parliamentary accountability.	governance sebagai variabel dependen.	

2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Good governance dengan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan

Good governance adalah, suatu penyelenggaraan negara yang mengarah pada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah – masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi**.(Soelendro : 2000)**

Latar belakang dikeluarkannya instruksi ini antara lain dilandasi oleh pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN).Disamping itu,dengan inpres tersebut semangat yang terkandung adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab.Disamping itu,laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintah dalam pencapaian vis misi dan tujuannya.

Inpres ini adalah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan good public governnace yaitu good governance di lingkungan birokrasi,dengan inpres ini diharapkan responsibility,transparancy,fairness dan accountability instani pemerintah ddalam menuangkan tuga dan fungsinya dapat ditingkatkan.**(Ihyaul Ulum : 2004)**

Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih,dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah .mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah,LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampsikan secara periodik.LAKIP tersebut harus disampaikan selambat- selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir**(Deddi nordiawan dan ayuningtyas Hertianti : 2011).**

Kualitas pelaporan keuangan adalah Ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memnuhi tujuannya. **(Abdul hafiz tanjung : 2008).**

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, dan dipahami **(Abdul hafiz tanjung : 2008).**

2.2.2 Pengaruh Good governance terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan

Pentingnya kebutuhan LAKIP sebagai upaya dan merupakan salah satu bentuk pengendalian internal dalam rangka mewujudkan good governance **(H.E Ristandi : 2004)**

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/ publik melalui lembaga perwakilan. Instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah**.(Andaliza, Ak., M.B.A. BPKP : 2007)**

Dalam mewujudkan good governance itu adalah salah satunya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan gambaran dari kinerja instansi pemerintah yang didalamnya menilai kinerja instansi pemerintah.

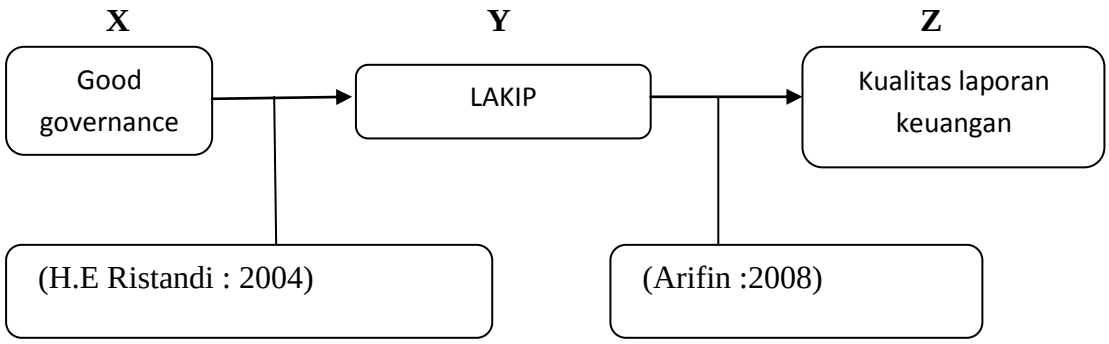
Pengaruh positif laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan **(Arifin :2008).**

Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.kemudian, pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP.LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak di susun dan di sampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan setahun sekali. Penyusuanan LAKIP harus mengikuti prinsip – prinsip pelaporan pada umumnya,yaitu laporan harus disusun secara jujur,obyektif,akurat dan transparan.dalam hubungan itu,beberapa ciri laporan yang baik perlu diperhatikan, seperti relevan,tepat waktu,dapat dipercaya/diandalkan,mudah dimengerti (jelas dan cermat) dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan **(Deddi nordiawan dan ayuningtyas Hertianti : 2011).**

Kualitas pelaporan keuangan adalah Ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memnuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, dan dipahami **(Abdul hafiz tanjung : 2008).**

Sesuai dengan penjelasan diatas maka diharapkan Good governance itu dapat mempengaruhi Laporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Adapun Kerangka Pemikiran yang di tuangkan oleh penulis sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. **Sugiyono (2011:64)** menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis

juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik"

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah *Good governance* berpengaruh terhadap Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan berimplikasi pada kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung Barat secara parsial dan simultan.